



Jatidiri Pers dan Kaum Intelektual Indonesia

Refleksi 50 Tahun Indonesia Merdeka

Oleh: Akhmad Zaini Abar

PERS dan kaum intelektual adalah dua pilar demokrasi dalam masyarakat. Pers adalah institusi sosial yang mengolah dan mengelola fakta-fakta sosial menjadi informasi dalam masyarakat, sedangkan kaum intelektual adalah kelompok masyarakat yang selalu peduli dan berfikir kritis perihal problem yang dihadapi masyarakat. Dalam sejarah Indonesia, kedua entitas masyarakat ini memiliki hubungan yang sangat unik, erat dan tidak dapat dipisahkan. Pada satu sisi, dalam sejarah bangsa ini, pers yang mula-mula mengangkat seseorang kemudian dikenal sebagai intelektual. Pers pulalah yang kemudian mempopulerkan dirinya dan pemikirannya ke masyarakat luas. Hampir tidak pernah ada intelektual yang lahir tanpa melalui jalur publikasi pers.

Pada sisi lain, eksistensi pers Indonesia juga amat ditunjang oleh kaum intelektual, baik sebagai pengelola/jurnalis maupun sebagai sumber dan narasumber informasi. Tidak hanya itu, bahkan jatidiri dan cita-cita pers amat dipengaruhi oleh kaum intelektual.

Di saat pers dekat dan akrab bergaul dengan kaum intelektual maka jatidiri dan cita-citanya dapat dipertahankan, dikembangkan dan diperjuangkan. Tetapi, ketika pers jauh meninggalkan atau ditinggalkan kaum intelektual, maka jatidiri dan cita-citanya surut ke belakang. Dengan kata lain, eksistensi idealisme pers amat tergantung pada dekat atau tidaknya dengan dunia intelektual.

Jikalau pers mendapat kendala kebebasan, misalnya pembreidelan, maka kaum intelektuallah yang mula-mula memprotesnya. Mereka mengatakan bahwa kebebasan pers adalah sebuah hak asasi, prasyarat demokrasi dan kedaulatan rakyat yang tak dapat ditawar. Sebaliknya manakala kaum intelektual mendapat kesulitan politik misalnya di antara mereka ada yang kena cekal menulis, berbicara, bepergian ke luar negeri dan lain-lain, maka perslah yang mula-mula prihatin dan mengeluhkannya, atau setidaknya mempublikasikan peristiwa pencekalan tersebut.

Perlu dicatat, di dalam sejarah, tidak jarang keduanya sama-sama mendapat represi dari penguasa, sehingga kesulitan untuk membuka suaranya. Di saat ada pelarangan terbit bagi pers, di saat itu pula ada penangkapan sejumlah intelektual. Atau di saat ada pelarangan berbicara atau menulis bagi para intelektual, di saat itu pula telepon di meja redaksi berbunyi, lalu terdengar perintah agar tak memberitakan atau memuat suatu fakta atau kejadian, kecuali menggunakan versi si penelepon.

Pada beberapa periode dalam sejarah nasional, keduanya bisa saling mengkritik dan mencemooh. Cendekiawan mengatakan pers tidak punya daya kritis lagi, terlalu pragmatis serta *profit oriented*. Sebaliknya, pers tak mau kalah, ia mengatakan bahwa kaum intelektual tidak punya pemikiran alternatif yang dapat memberikan sinar bagi pem-

baruan masyarakat. Banyak kaum intelektual sudah melakukan kolusi, baik dengan birokrasi, pengusaha maupun politisi untuk tujuan pragmatis dan politis. Walaupun demikian, kritikan dan cemoohan di antara keduanya, sebenarnya lebih merupakan kegiatan otokritik, di mana mereka saling mengingatkan jati diri dan cita-cita mereka masing-masing, yakni memperjuangkan kebenaran, keadilan, hak asasi manusia dan hati nurani rakyat.

Berdasarkan argumen itu dapat dikatakan, bahwa kaum intelektual dan pers merupakan dua entitas masyarakat (*society*) yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kaum intelektual tanpa pers akan sulit mengaktualisasikan diri dan pemikirannya, sementara pers tanpa dukungan kaum intelektual, akan cenderung kehilangan idealismenya.

Perintis Pers

Asal-usul dan cikal-bakal pers nasional sesungguhnya digagas, dibangun dan dikelola oleh sejumlah kaum intelektual. Banyak buku tentang sejarah pers Indonesia mencatat nama-nama sejumlah intelektual yang terlibat langsung mendirikan dan mengelola pers Indonesia.

Misalnya di awal abad XX, dalam sejarah pers Indonesia tersebutlah nama R.M. Tirtohadisoerjo (1875-1918), seorang intelektual pribumi pendiri Serikat Dagang Islam, yang menerbitkan buku harian bernama *Medan Priaji*. Motto perjuangannya berbunyi: "*Organisasi boeat bangsa yang diperintah di Hindia Olanda, tempat akan memboeka suaranya Anak Hindia.*" *Medan Priaji* adalah pers Indonesia pertama, yang selain dikelola sendiri oleh kaum pribumi untuk memperjuangkan nasib kaum pribumi dan menentang penjajahan Belanda, juga dibangun dengan kapital asli pribumi.

Kelahiran *Medan Priaji* ini dianggap oleh para penulis sejarah pers sebagai tonggak sejarah kelahiran pers nasional. Bahkan, kata Pramoedya Ananta Toer, dalam bukunya *Sang Pemula* (1985), *Medan Priaji* dianggap sebagai koran yang membangun cikal bakal idealisme pers nasional yang hingga kini masih saja menjadi bahan retorika politik pejabat, wartawan, intelektual, akademisi atau

siapapun yang cinta dengan sejarah dan perjuangan pers nasional. Ketika itu *Medan Priaji* memposisikan dirinya sebagai sosok atau institusi yang berperan antara lain: (1) memberikan informasi; (2) menjadi penyuluh keadilan; (3) memberikan bantuan hukum; (4) tempat orang tersia-sia mengadukan halnya; (5) menyiarkan peluang kerja; (6) menggerakkan bangsanya untuk berorganisasi atau mengorganisasi diri (baca: berpolitik); (7) membangun dan memajukan bangsanya; dan (8) memperkuat bangsanya dengan usaha perdagangan.

Kemudian, tercatat nama Abdul Rivai (1871-1933), seorang dokter almunus STOVIA dan anggota Volksraad yang dikenal sebagai penulis tajam, yang tanpa tadeng aling-aling melemparkan kritiknya terhadap pemerintah kolonial Belanda. Abdul Rivai banyak aktif dalam dunia jurnalistik, antara lain menjadi redaktur mingguan *Bintang Hindia*.

Danudirdja Setiabudi, atau yang lebih dikenal dengan nama Douwes Dekker (1879-1950), yang disebut-sebut sebagai orang yang pertama mendirikan partai kebangsaan Indonesia secara konsisten menentang penjajah Belanda. Douwes Dekker terkenal di kalangan penjajah Belanda sebagai orang yang sangat tajam tulisannya dalam masalah penderitaan rakyat, ketimpangan sosial, dan korupsi di Hindia Belanda. Harian yang didirikannya antara lain, adalah harian *Express* yang membawa gagasan tentang kemerdekaan Indonesia.

Lalu, ada nama-nama tokoh sejarah terkenal lainnya yang dapat dikategorikan sebagai kaum intelektual pra-kemerdekaan pengelola pers, seperti: Abdul Muis seorang sastrawan yang terkenal dengan romannya *Salah Asuhan* mendirikan majalah *Hindia Sarekat*; Wahidin Sudirohusodo penggagas berdirinya Budi Oetomo adalah redaktur majalah *Retnodhoemila* di Yogyakarta; Ki Hadjar Dewantara, tokoh pendidikan nasional Indonesia pendiri Perguruan Taman Siswa, adalah pengelola majalah *Hindia Putra* di Den Haag; H.O.S. Tjokroaminoto pengelola harian *Oetusan Hindia* di Surabaya; Haji Agus Salim pengelola harian *Fajar Asia* di Jakarta; Dr. Soetomo penggagas dan pengelola *Penyebar Semangat* di Solo; Soekarno memimpin *Fikir*

an *Ra'jat* di Bandung; Muhammad Hatta dan Sutan Sjahrir mengelola *Daulat Rak'jat* dan *Kedaulatan Ra'jat* di Yogyakarta; sementara Sartono, Amir Sjarifuddin dan Muhammad Yamin mengelola *Persatuan Indonesia*.

Begitu pula nama-nama terkenal lainnya, seperti Sayuti Melik, Buya Hamka, Mohammad Natsir, Yusuf Abdullah Puar, Adam Malik, Sumanang, adalah intelektual Indonesia yang banyak terlibat dalam mengelola pers Indonesia di masa menjelang kemerdekaan Indonesia.

Setelah kemerdekaan Indonesia, kita menemukan beberapa nama intelektual pengelola pers Indonesia, seperti Mohtar Lubis (*Indonesia Raya*), Rosihan Anwar (*Pedoman*), B.M. Diah (*Merdeka*), Suardi Tasrif (*Abadi*), Mahbub Junaedi (*Duta Masyarakat*), P.K. Ojong (*Keng Po* dan *Star Weekly*) dan lain-lain.

Di awal kebangkitan kekuasaan pemerintah Orde Baru, ada sejumlah pers baru lahir yang dikelola oleh sejumlah intelektual kampus pendukung "Orde Baru Awal." Misalnya, *Harian KAMI* yang terbit di Jakarta, dipimpin oleh Nono Anwar Makarim seorang aktivis Angkatan 66, mingguan *Mahasiswa Indonesia* (edisi Jawa Barat) yang terbit di Bandung dipimpin oleh A. Rahman Tolleng, mingguan *Mimbar Demokrasi* yang didirikan oleh Sugeng Saryadi dan Adi Sasono, *Angkatan Baru* harian yang diterbitkan oleh HMI serta majalah mingguan berita *Tempo* yang dipimpin Goenawan Mohammad.

Tetapi, di masa Orde Baru, di mana penyelenggaraan pembangunan lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kapitalisme internasional dengan didukung oleh pembangunan politik yang berorientasi pada stabilitas dan pemusatan kekuasaan, pers yang dikelola kaum intelektual ini satu per satu berguguran. Ada yang gagal bertahan akibat tekanan ekonomi yang semakin berat dan oplahnya makin mengecil serta ada yang terlindas pertarungan politik pada waktu itu. Puncak dari rontoknya pers yang dikelola kaum intelektual adalah, ketika terjadi Peristiwa Malari 1974, di mana berlangsung pembredelan belasan harian dan mingguan terkemuka di Indonesia, yang sebagian besar adalah pers yang dikelola kaum intelektual, misalnya *Harian KAMI*, *Mahasiswa Indonesia*,

Indonesia Raya, *Nusantara* dan *Pedoman*.

Pada pertengahan 1970-an, pengelolaan pers kemudian banyak beralih ke sejumlah kaum profesional yang terdidik dan terlatih khusus di bidang jurnalistik yang didukung ataupun mendukung pemilik modal. Kita lihat saja sekarang, apalagi setelah majalah *Tempo* dibredel, di mana kemudian Goenawan Mohammad bekas pemimpin redaksinya dicabut keanggotaannya dari PWI akibat keterlibatannya dalam Asosiasi Jurnalis Independen (AJI, sebuah organisasi wartawan tandingan bagi PWI), sudah tidak ada lagi pers yang dipimpin atau dikelola intelektual.

Kecenderungan demikian membawa implikasi pada bergeraknya posisi kaum intelektual dalam pers Indonesia, yakni dari posisi sebagai "orang dalam," berubah menjadi "orang luar" institusi pers. Pola hubungan yang baru ini, tentu saja mengurangi kedekatan dan keakraban pers dengan kaum intelektual yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas idealisme pers. Kalau pada mulanya, pers "bersatu-tubuh" dengan kaum intelektual, maka idealisme pers menjadi sangat kental. Tetapi sekarang karena posisinya pers secara institusional terpisah dengan kaum intelektual, maka idealisme pers cenderung luntur.

Perubahan ini membuat pers Indonesia menjadi semakin industrial dan pragmatis, di mana posisi kapital menjadi sangat penting dan menggeser dominasi posisi jurnalis yang dulu dominan, ketika pers dikelola sejumlah intelektual. Dalam arti, keputusan redaksional, misalnya dimuat tidaknya suatu berita atau karangan, dipublikasikan atau tidaknya suatu fakta sosial, dikomentari atau tidaknya suatu peristiwa, sangat dipengaruhi oleh pertimbangan perihal eksistensi modal dan perkembangan oplah. Sementara pertimbangan ideal, seperti dipilihnya kepentingan rakyat kecil sebagai *angle* pemberitaan atau komentar, dikritik dan dikontrolnya berbagai tindakan penguasa atau keputusan politik yang distorsif dari kepentingan dan aspirasi rakyat, lebih sering ditinggalkan.

Fenomena demikian, tentu saja tidak melanda seluruh institusi pers yang ada di Indonesia. Ada beberapa pers, walaupun bersifat pasang-surut, masih mampu mempertahankan jatidiri dan cita-cita perjuangannya. Hal

ini dapat terjadi, sebab ada sejumlah pers yang berhasil menempatkan posisi intelektual yang kini berada di luar institusi pers, agar tetap berpartisipasi secara *kognitif* dalam pemberitaan pers. Dalam hal ini, posisi kaum intelektual ditempatkan sebagai *sumber* dan *narasumber* informasi. Dalam praktek, misalnya pers meliput berbagai aktivitas kaum intelektual, mengutip berbagai pernyataan, keprihatinan atau kritikan mereka, mewawancarai mereka untuk menjelaskan atau mengomentari peristiwa tertentu, atau mengundang mereka untuk menulis pada rubrik opini, dan lain-lain.

Untuk menempatkan kaum intelektual sebagai sumber dan narasumber informasi, bagi pers bukan tanpa masalah. Dalam kondisi politik yang mementingkan ketertiban, maka suara kaum intelektual di dalam pers menjadi salah satu obyek sasaran penertiban oleh kekuasaan. Sehingga, pers terkesan ragu-ragu bahkan takut menyajikan suara kaum intelektual secara polos tanpa sensor. Kenyataan ini, mengakibatkan realitas kaum intelektual dalam pers juga terkesan kusut dan kusim, seakan-akan mereka sering bersilat lidah dan menjual kecap saja.

Di saat kondisi politik mulai terbuka dalam beberapa tahun lalu (terutama sebelum pembreidelan *Tempo, Editor dan Detik* Juni 1994), dalam derajat tertentu memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat dan bersuara vokal, maka pers pun menjadi sedikit leluasa menyajikan suara kaum intelektual. Tanpa banyak sensor, suara kaum intelektual dapat disajikan secara menarik oleh pers. Dalam kondisi demikian, maka idealisme pers pun dapat dikembangkan.

Namun demikian, dalam konsisi di mana kemungkinan suara kaum intelektual dapat leluasa dipublikasikan, telah pula mengakibatkan perkembangan yang mengkhawatir-

kan pada sebagian pers Indonesia. Misalnya, ada sejumlah pers justeru berusaha "mengkomoditisasi" kaum intelektual dan pemikiran mereka. Pernyataan yang vokal atau kritikan yang tajam dari kaum intelektual dikutip pers lebih untuk kepentingan komersial daripada idealisme. Dalam arti, yang diperhatikan pers demikian, bukan makna sosial politik dari pernyataan atau kritikan kaum intelektual, tetapi adalah nilai jualnya.

Dengan kata lain, untuk masa sekarang dan masa mendatang, baik kondisi politik yang represif maupun kondusif bagi kaum intelektual untuk berekspresi melalui pers atau bagi pers untuk mengekspresikan suara kaum intelektual, dapat menjebak kedua-duanya menjauhi jatidiri mereka masing-masing. Kondisi represif membuat keduanya sulit menegaskan dan mengartikulasikan jatidiri mereka masing-masing. Sebaliknya, kondisi yang kondusif pun, misalnya pada suatu masa terjadi deregulasi lisensi terbit/usaha bagi pers di negeri ini, tidak menjamin keduanya lebih ekspresif dan artikulatif. Justru sangat mungkin keduanya berkolusi menghianati jatidiri dan cita-cita mereka masing-masing, di mana pers mengkomodifikasi suara intelektual, sementara kaum "intelektual" mejajakan dirinya untuk sesuatu yang lebih dari sekedar sesuap nasi.

Perlu dicatat, bahwa dua entitas masyarakat ini - baik pers maupun kaum intelektual - sekarang berada dalam situasi struktural tertentu di mana kapitalisme semakin revolusioner dan cenderung meniadakan segala bentuk jatidiri lama dan menawarkan "jatidiri" baru yang hingga kini kita juga belum mengenalnya. ●

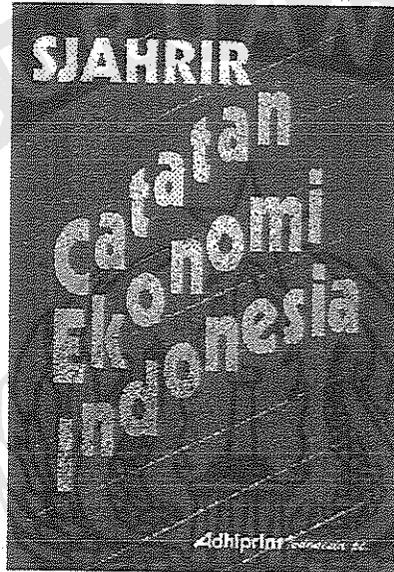
Akhmad Zaini Abar,
peneliti media massa di Lembaga Penelitian,
Pendidikan dan Penerbitan "YOGYA" (LP3Y).

Indonesia dalam Dekade Deregulasi

● Kumpulan editorial *Sjabrir* dalam buletin *Business News*.

Buku yang memperlihatkan dinamika ekonomi Indonesia sepanjang tahun 1980-an.

● Dengan kritis, namun teduh dan bijak, memperingatkan



pemerintah tentang implikasi dari inkonsistensi kebijakan deregulasi.

● Penting sebagai bahan studi bagi para pengamat, peminat dan pelaku serta mahasiswa bidang ilmu ekonomi, hukum dan politik.

Catatan Ekonomi Indonesia

Oleh *Sjabrir*

xvii + 276 hal

Rp 12.500,00

Penerbit : Adhiprint Indonesia

Penyalur tunggal : PT Pustaka LP3ES Indonesia

Dapatkan di toko buku di kota anda. Pesanan langsung tambah ongkos kirim, minimum Rp 2.000,-/eks ke :

PT Pustaka LP3ES Indonesia

Jl. S. Parman 81, Jakarta 11420

Telp. 5663527, 5674211 (3 saluran); Fax. : (021) 5683785

Menuju Era Otonomi Daerah

Pengantar

Era Otonomi Daerah akhir-akhir ini menjadi isu nasional apalagi setelah Kepala negara mencanangkan uji-coba otonomi daerah pada tanggal 25 April 1995. Ketetapan ini menjadi tonggak historis karena pemerintah telah menunjukkan kemauan politik untuk melaksanakan otonomi daerah. Meskipun baru diujicobakan di 26 kabupaten dan akan dinilai kembali setelah 2 tahun berlaku, namun pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ini dinilai merupakan langkah yang amat maju.

Banyak pendapat dilontarkan terhadap pencanangan otonomi daerah. Di tengah nada yang mendukung langkah berani ini, ternyata masih banyak pihak yang menyangsikan keputusan tersebut. Bahkan di kalangan aparatur pemerintah sendiri masih ada "tarik-ulur" terhadap penyerahan berbagai urusan kepada Daerah Tingkat II sebagai titik berat otonomi daerah. Ada pendapat yang menyatakan belum siapnya instansi yang akan melaksanakan tugas pemerintahan di Dati II. Ada pula yang beranggapan bahwa otonomi daerah adalah program Departemen Dalam Negeri.

*Bagaimana persoalan otonomi daerah dan kesiapan Dati II menerima pelimpahan sebagian urusan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dati I? Tim liputan **Prisma** – Maruto MD, Paulus Widiyanto, Yoyok Hadiwahyono, Paul. J. Litaay dan Anang B. Rachmadi telah melakukan serangkaian wawancara dengan Dirjen PUOD – **H. Sumitro Maskun, Afan Gaffar, Bupati Bandung – U. Hatta Djatipermana, Bupati Sleman – Arifin Ilyas dan Bupati Banyumas (Purwokerto) – Djoko Sudantoko.** Berikut ini sebagian laporannya.*

Redaksi